

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu Daud Busroh. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press Jakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Andryan. 2022. *Landasan & Teknik Perundang-undangan*. Setara Press, Malang.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Ind-Hill. Co, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono. 2020. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat*. Ditjen PP, Jakarta.
- Eka Nam Sihombing. 2021. *Ilmu Perundang-undangan*. Setara Press, Malang.
- Enny Nurbaningsih. 2019. *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*. Rajawali Pers, Depok.
- I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, "Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016
- Inu Kencana Syafie. 2018. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jeremy Bentham. 2006. *Teori Perundang-undangan*. Nuansa Cendekia, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press Jakarta.
- , 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.
- , & M. Ali Safa'at. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.

- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah*. Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Laurensius Arliman. 2016. *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Lita Tyesta. 2020. *Perancangan Hukum Pembentukan Perundang-undangan Teori dan Praktik*. CV. Mahata, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. PT Kanisius, Yogyakarta
- , 2015. *Teori Perundang-undangan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Marzuki Lubis. 2011. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Muchtar 2009. Rosyidi. *Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. ITS Press, Surabaya.
- Muhammad Fauzan. 2020. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Muhammad Junaidi. 2021. *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. USM Press, Semarang.
- Nana Supena. 2022. *Praktik dan Dinamika Hukum Perundang-undangan*. Deepublish, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*. Pustaka Setia, Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Putera Astomo. 2019. *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosyid Al Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Setara Press, Malang.
- Sadjijono. 2008. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan. Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2010. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Suhariyono. 2022. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Supardan Modeong. 2007. *Teknik Perundang-undangan*. Perca, Jakarta.

Wicipto Setiadi. 2022. *Hukum Pengujian Perundang-undangan Terhadap Produk Perundnag-undangan di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Hukum/Majalah Ilmiah

Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema keadilan Volume 6 Edisi III*. Oktober-November 2019

Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sosfilkom Volume XIII Nomor 01*. Januari-Juni 2019

Anang D. & Harsanto N, “Problematisa dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik”, *Jurnal Peraturan Volume 19 Nomor 3*. Mei-Agustus 2022

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Nomor 2*, Mei-Agustus 2014

Arie Elcaputera, Ahmad Wali & Ari Wirya Dinata, “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 11 No.1*, Februari 2022

Helmi, “Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021

I Kadek Yuliana, “Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?”, *Jurnal Kertha Semaya Volume 10 Nomor 1*. 2021

Muhammad Akbal, “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Supremasi Volume XI Nomor 2*. 2016

Lis Setiyowati, “Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1*, Oktober 2018

Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hasanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi Nomor 2*, Juni 2002

Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti, “Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1 Nomor 1*, 2022

Makalah Seminar/Diskusi

Bachtiar. 2018. “Arah Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Terkait Pemerintahan Daerah: Kritisitas Keberadaan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018”. *Makalah, Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Isu-Isu Aktual Bidang Hukum yang diselenggarakan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri*. Mercure Ancol, 27 September.

Mia Kusuma Fitriana. 2015. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulation In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal)”, Hasil Penelitian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Kalimantan Timur

Dani Muhtada, Ayon Diniyanto. 2017. *“Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi di Indonesia*

Direktorat Hukum dan Ham, 2005. “Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung Pembangunan Nasional”, *Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*, Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2011. “Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi”. *Laporan Hasil Kajian Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Internet

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. Diakses 8 November 2022.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.artikel-hukum-tata-negara-dan-peraturan-perundang-undangan>

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364591&lokasi=lokal>, Diakses 11 Januari 2023

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>. Diakses 12 Maret 2023

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mkri.id>. Diakses 12 Maret 2023

<https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/198>. Diakses 22 Maret 2023

<https://www.ekon.go.id/source/publikasi/daftar-perda-perkada-dan-permendagri-yang-dibatalkan-2016.compressed-2-.pdf>. Diakses 22 Maret 2023

<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>. Diakses Tanggal 22 Maret 2023.

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 23 Maret 2023

<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses Tanggal 25 Maret 2023.

<https://keluhkesah.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses Tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan-dengan-peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut>. Diakses Tanggal 28 Maret 2023.

<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>. Diakses Tanggal 28 Maret 2023.

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 28 Maret 2023.

<https://business-law-binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 28 Maret 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-4824308/jokowi-kita-diatur-42-ribu-regulasi-nggak-mau-saya>. Diakses 29 Maret 2023.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundang-an.pdf>. Diakses Tanggal 1 April 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu-lt5bdc39c5d3a98>. Diakses 2 April 2023.

<https://www.google.com/ditjenpp.kemenkumham.go.id-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang>. Diakses 2 April 2023

<https://www.google.com/url?https%3A%2F%2Fsumut.kemenkumham.go.id%2Fberita-kanwil%2Fberita-utama%2Fpenyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>. Diakses Tanggal 20 April 2023

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20309035-S42534-Implikasi%20peran.pdf>. Diakses Tanggal 20 April 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan-hol18765?page=all>. Diakses Tanggal 20 April 2023

<https://biroorganisasi.jogjapro.go.id/v1/pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses 6 Mei 2023

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan-sering-kurang-optimal>. Diakses 6 Mei 2023